

**PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, DAN ETIKA  
TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA INSPEKTORAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi



**RUSLAN ASHARI**  
**A311 07 203**

**PROGRAM KEKHUSUSAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN/  
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2011**

**PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, DAN ETIKA  
TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA INSPEKTORAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

O L E H :

**RUSLAN ASHARI**  
**A311 07 203**

Skripsi Sarjana Lengkap Guna Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Kekhususan  
Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin  
Makassar

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr. H. Abd. Hamid Habbie, SE, MSi**  
**NIP. 196305151992031003**

Pembimbing II



**Dra. Hj. Haliah, M.Si, Ak**  
**NIP. 196507311991032002**

**PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, DAN ETIKA  
TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA INSPEKTORAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

OLEH :  
**RUSLAN ASHARI**  
**A 311 07 203**

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 21 NOVEMBER 2011

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Dr. H. Hamid Habbe, SE, M.Si	(Ketua, FEB-UH)	1. 
2. Dra. Hj. Haliah, M.Si, Ak	(Sekretaris, FEB-UH)	2. 
3. Drs. Syahrir, M.Si, Ak	(Anggota, FEB-UH)	3. 
4. Dra. A. Kusumawati, M.Si, Ak	(Anggota, FEB-UH)	4. 

DISETUJUI OLEH :

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Ketua



**Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, MSi**  
**NIP. 196305151992031003**

Tim Penguji  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Ketua



**Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, MSi**  
**NIP. 196305151992031003**

## ABSTRAK

**RUSLAN ASHARI,** *Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.* (Dibimbing oleh DR. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si dan Dra. Haliah, M.Si, Ak)

Tujuan penelitian ini antara lain untuk memperoleh bukti empiris guna diketahui dan dianalisis tentang pengaruh keahlian, independensi dan etika terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Pusat.

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Sampel dipilih secara total sebanyak 52 auditor/pemeriksa. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 52 responden yang penelitiannya melalui kuesioner.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian, independensi dan etika. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas auditor. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan keahlian, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Secara parsial keahlian dan independensi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, namun tidak untuk etika dimana tidak signifikan terhadap kualitas auditor. Pengaruh terbesar terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah keahlian.

**Kata Kunci : Keahlian, Independensi, Etika dan Kualitas Auditor**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Alhamdulillahilahi Rabbil'alam*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara” sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara (STAR-SDP).

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Abd. Muid Munim dan Ibunda Hj. Kalsum Abdullah, Isteriku tersayang Novita Boulu dengan segala upaya dukungannya selama ini beserta anak-anakku Asri, Abi, Hasan & Husain, kedua adikku tercinta Hj, Mardiana dan Sri Yanti atas upaya dan doanya yang tak ternilai.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Bpk Tahmid Husen, SE selaku Inspektur pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara
2. Bpk H. Muabdin H Radjab, SH beserta seluruh staf dan ke-empat Inspektur Pembantu (Irban) beserta teman-teman auditor/pemeriksa

3. Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si dan Dra. Haliah, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing
4. Dr. Darwis Said, SE, M.SA, Ak, selaku Wakil Dekan I yang selalu memberikan dorongan dan arahan dalam pelaksanaan program STARSDP ini.
5. Drs. A. Kusumawati, M.Si, Ak dan Drs. Syahrir, M.Si, Ak selaku dosen penguji.
6. Seluruh dosen beserta staf/pegawai Fakultas Ekonomi khususnya buat pengelola Program Studi Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara (STAR-SDP)
7. Sahabatku 4 orang mahasiswa Program Studi Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara (STAR-SDP) semoga mendapatkan segala harapan dan cita – cita yang diimpikan.
8. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu,  
Tersampaikan ucapan terima kasih

Akhirnya, semoga Allah SWT berkenaan membalas budi baik mereka. Besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, 2011

Penulis

H. Ruslan Ashari

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penulisan .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Batasan Penelitian .....	7
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
<b>II. Landasan Teori .....</b>	<b>9</b>
2.1. Pengertian Audit .....	9
2.2. Proses Audit Sektor Publik .....	9
2.2.1. Perencanaan Audit Sektor Publik .....	10
2.2.2. Pelaksanaan Audit Sektor Publik .....	10
2.2.3. Pelaporan .....	13
2.3. Definisi/Pengertian dan Ruang Lingkup .....	17
2.3.1. Kualitas Auditor .....	17
2.3.2. Keahlian .....	19
2.3.3. Independensi .....	21
2.3.4. Etika .....	22
2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	23
2.5. Hipotesis Penelitian .....	25

<b>III. Metode Penelitian .....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	26
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.3. Populasi dan Sampel .....	26
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	27
3.5. Instrumen Penelitian .....	28
3.6. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel .....	28
3.7. Metode dan Teknik Analisis Data .....	30
3.7.1. Model Analisis Data.....	30
3.7.2. Teknik Analisis Data .....	30
3.7.3. Uji Kualitas Data .....	30
3.7.4. Uji Asumsi Klasik .....	32
3.7.5. Statistik Deskriptif .....	34
3.7.6. Uji Hipotesis .....	34
<b>IV. Gambaran Umum SKPD Inspektorat Provinsi Maluku Utara ....</b>	<b>40</b>
4.1. Gambaran Umum Inspektorat .....	40
4.2. Visi, Misi dan Tupoksi Inspektorat .....	41
4.3. Struktur Organisasi .....	44
<b>V. Pembahasan .....</b>	<b>48</b>
5.1. Deskripsi Data .....	48
5.1.1. Deskripsi Lokasi .....	48
5.1.2. Karakteristik Responden .....	49
5.2. Hasil Analisis Data .....	51
5.2.1. Uji Kualitas Data .....	51
A. Uji Validitas .....	51
B. Uji Reliabilitas .....	53
5.2.2. Uji Asumsi Klasik .....	54
A. Uji Normalitas Data .....	54
B. Uji Multikolinieritas .....	56
C. Uji Heterokedastisitas .....	57
5.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	58



A. Variabel Keahlian ( $X_1$ ) .....	58
B. Variabel Independensi ( $X_2$ ) .....	59
C. Variabel Etika ( $X_3$ ) .....	61
D. Variabel Kualitas Auditor (Y) .....	62
5.3. Pengujian Hipotesis .....	63
5.3.1. Pengujian Hipotesis dengan Uji F .....	63
5.3.2. Pengujian Hipotesis dengan Uji t .....	64
5.4. Hasil Persamaan Regresi .....	65
5.4.1. Analisa Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	66
5.5. Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
5.5.1. Pengaruh Keahlian terhadap Kualitas Auditor .....	69
5.5.2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Auditor .....	69
5.5.3. Pengaruh Etika terhadap Kualitas Auditor .....	70
<b>VI. Penutup .....</b>	<b>71</b>
6.1. Kesimpulan .....	71
6.2. Saran .....	72
Daftar Pustaka .....	73

## DAFTAR TABEL

Nomor	Hal
Tabel 2.1 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	31
Tabel 5.1 Pengumpulan Data .....	48
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja .....	49
Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	50
Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	50
Tabel 5.6 Uji Validitas Variabel Penelitian .....	52
Tabel 5.7 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .....	53
Tabel 5.8 Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 5.9 Deskripsi Variabel Keahlian ( $X_1$ ) .....	58
Tabel 5.10 Deskripsi Variabel Independensi ( $X_2$ ) .....	59
Tabel 5.11 Deskripsi Variabel Etika ( $X_3$ ) .....	61
Tabel 5.12 Deskripsi Variabel Kualitas Auditor ( $Y_1$ ) .....	62
Tabel 5.13 Hasil Uji F .....	63
Tabel 5.14 Pengaruh Secara Parsial (Uji Parsial – Uji t) .....	64
Tabel 5.15 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1 Sistematika Temuan .....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	48
Gambar 5.1 Diagram Histogram .....	55
Gambar 5.2 Normal P- Plot .....	55
Gambar 5.3 Scatterplot .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>Hal</b>
1. Kuesioner Penelitian .....	76
2. Frekuensi Jawaban Responden .....	79
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	85
4. Uji Asumsi Klasik .....	89
5. Analisa Regresi Linear Berganda .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan **aparatur pengawasan intern pemerintah.**” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit

oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti yang baru saja terjadi pada BPK Perwakilan Jawa Barat (10/11/2010, <http://infokorupsi.com>), terdapat kasus penyuapan yang juga banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah kota bekasi, salah satu dari sekian jumlah diantaranya kepala inspektorat pemkot bekasi. Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu dan kesempatan. Semoga hal – hal yang seperti ini menjadi satu catatan penting dan contoh buruk yang ada ini bisa menjadi batasan indikator sehingga tidak lagi terjerumus ke dalam hal yang serupa.

Mengapa hal ini dapat terjadi? Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Di

samping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya di singkat dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan

berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua menegaskan bahwa standar Audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing – masing, dalam rangka peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan pemeriksaan.

Menurut peraturan Menpan tersebut kualitas auditor dipengaruhi oleh :

1. **Keahlian**, menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan kriterianya auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Starata Satu (S1) atau yang setara; memiliki kompetensi di bidang *auditing*, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi; dan telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA); serta mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
2. **Independensi**, menyatakan bahwa Auditor APIP harus dalam pelaksanaan tugasnya dengan kriterianya auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika



independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.

3. **Kepatuhan pada kode etik**, menyatakan bahwa auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP, dengan kriterianya kode etik pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat.

DeAngelo (dalam Deis dan Giroux, 1992) mendefinisikan kualitas auditor sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu dari faktor kemampuan teknis atau keahlian (*expertise*) dan faktor independensi auditor.

Adapun Bedard (1986) dalam Lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Hogan (1997) menunjukan bahwa kantor akuntan besar dapat memberikan kualitas auditor yang baik yaitu dengan mengurangi terjadinya *under pricing* pada saat perusahaan melakukan penawaran perdana (*initial public stock offering, IPO*). Hal ini disebabkan atestasi yang dilakukan auditor yang berkualitas baik akan mengurangi asimetri informasi yang semakin besar dibandingkan dengan auditor yang berkualitas rendah.

Selanjutnya DeAngelo dalam Komalasari (2003) berargumentasi bahwa ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas auditor. *Economics of scale* Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan *Security and Exchange Commission* (SEC) sebagai cara pengembangan dan pemasaran keahlian KAP tersebut. KAP diklasifikasikan menjadi dua yaitu kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP *The Big Five*, dan kantor akuntan publik lainnya. Auditor beroperasi dalam lingkungan yang berubah, ketika biaya keagenan tinggi, manajemen mungkin berkeinginan pada kualitas audit yang lebih tinggi untuk menambah kredibilitas laporan, hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pemantauan.

Sarundajang (2004) mengatakan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan saat ini masih memprihatinkan khususnya pada Bawasda Kabupaten dan kota serta merupakan tempat pembinaan para aparat yang bermasalah. Berdasarkan hasil survey ADB tahun 2003 bahwa tenaga yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Bawasda sedikit sekali (kurang dari 1%). Sementara Bawasda juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan di daerah dan hasilnya belum memenuhi prinsip akuntansi. Untuk mengatasi hal ini tentu ada program peningkatan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan diperlukan rekrutmen tenaga baru untuk dijadikan auditor.

Independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Menurut Harahap (1991), auditor harus bebas dari kepentingan terhadap perusahaan dan laporan keuangan yang dibuatnya. Sejalan dengan peraturan Menpan No. Per/05/M.Pan/03/2008, dan berdasarkan peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara diatur mengenai standar umum pemeriksaan yaitu :

1. Persyaratan kemampuan / keahlian
2. Independensi
3. Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit yang bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keefektifan, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dan kondisi real yang ada pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara serta keterbatasan jumlah auditor dan kompetensi teknis yang dimiliki, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dengan judul : **Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Apakah Keahlian, Independensi, dan Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

## **1.3 Tujuan penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris untuk menganalisis tentang pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

- a. Sebagai bahan pertimbangan khususnya Provinsi Maluku Utara dalam memahami fungsi, peran, tanggungjawab dan tugas Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Sebagai bahan kajian berupa sumbangan pemikiran tentang kualitas auditor dan pelatihan yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja auditor Inspektorat Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.
- c. Untuk menambah dan memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang apa yang telah penulis lakukan dan sebagai refensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar lebih terarah dan jelas penelitian ini, maka batasan aspek dalam penelitian ini yakni tentang kualitas auditor khususnya aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan faktor – faktor yang mempengaruhinya yakni yang hanya dibatasi khususnya pada keahlian, independensi dan etika.-

#### **1.6 Sistematika penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan teori dan pengembangan hipotesis berisi tentang teori–teori yang relevan digunakan untuk mendukung proses penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis.
- Bab III : Metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, pemilihan variabel dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- Bab IV : Gambaran Umum Instansi yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Provinsi Maluku Utara
- Bab V : Pembahasan mengenai gambaran hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis.
- Bab VI : Penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Audit**

Menurut *Committee of Auditing Concepts* (2005) Pengertian Auditing adalah :

“suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti – bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang kegiatan atau kejadian ekonomis untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.”

Menurut Arrens and Loebbecke (2005) pengertian auditing adalah :

“suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti – bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan sejauhmana kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Leo Hebert (2005) pengertian auditing adalah :

“ suatu proses kegiatan selain bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin ketaatan terhadap hukum, kebijaksanaan dan peraturan melalui pengujian apakah aktivitas organisasi dan program dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.”

#### **2.2 Proses Audit Sektor Publik**

Langkah – langkah dalam proses audit (Indra Bastian, et.al) adalah : (1) Perencanaan (PLANNING) yang di dalamnya meliputi (a) Deskripsi sistem akuntansi keuangan sektor publik, (b) Menyusun tujuan dan lingkup audit, (c)

Menilai resiko, (d) Rencana audit (2) Pelaksanaan (EXECUTING) yang di dalamnya meliputi (a) Mengembangkan program audit, (b) Sistem pengendalian internal, (c) Melakukan pengujian prosedur analitik pengujian substantif (jika buruk), (d) Melakukan pengujian bersandar pada pengendalian internal pengujian substantif (jika baik) (3) Pelaporan (REPORTING) yang di dalamnya meliputi (a) Review kertas kerja dan kesimpulan, (b) Analisis hasil audit, (c) Laporan audit dan LHP bawasda pemda

### **2.2.1 Perencanaan Audit Sektor Publik**

Pada Audit Sektor Publik, Perencanaan merupakan tahap yang vital dalam audit meliputi tahap – tahap yakni (1) Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, (2) Penentuan tujuan dan lingkup audit yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas, (3) Penilaian resiko atas resiko pengendalian, resiko bawaan, resiko deteksi. (4) Penyusunan rencana audit, (5) Penyusunan program audit

### **2.2.2 Pelaksanaan Audit Sektor Publik**

Dalam pelaksanaan audit sektor publik, terdapat definisi struktur pengendalian internal. Ada 3 golongan tujuan yang terdiri atas (1) Keandalan laporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (3) Efektivitas dan efisiensi operasi. Pada jenis pengendalian internal juga meliputi atas organisasi, pemisahan tugas, fisik, persetujuan dan otorisasi, akuntansi, personel, supervisi dan manajemen.



Adapun unsur-unsur dari struktur pengendalian internal meliputi atas lima unsur pokok yakni : (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penaksiran resiko, (3) Informasi dan komunikasi, (4) Aktivitas pengendalian, dan (5) Pemantauan. Dalam pengendalian internal perlu pemahaman atas struktur pengendalian internal. Ada 3 jenis prosedur audit yakni : (1) Mewawancarai personel dinas/instansi yang berkaitan dengan unsur struktur pengendalian, (2) Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan dan (3) Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan/instansi. Hal yang terpenting adalah informasi yang dikumpulkan oleh auditor yakni : (1) Rancangan dari berbagai kebijakan dan prosedur, (2) Apakah kebijakan dan prosedur benar-benar dilaksanakan

Melakukan prosedur analitis dalam pelaksanaan audit sektor publik adalah hal yang diperlukan. Prosedur analitis membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahaman auditor mengenai bisnis klien yakni dengan cara-cara : (1) Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat, (2) Mengembangkan ekspektasi, (3) Melakukan perhitungan dan perbandingan, (4) Menganalisis data, (5) Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan dan (6) Menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan atas perencanaan audit

Pada perancangan pengujian substantif, auditor harus menghimpun bukti yang cukup . Perancangan dimaksud meliputi : (1) sifat pengujian, (2) waktu pengujian, dan (3) luas pengujian. Adapun prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif terdiri atas 8 (delapan) prosedur yakni : (1) Pengajuan pertanyaan, (2) Pengamatan atau observasi, (3) Inspeksi atas dokumen dan

catatan, (4) Perhitungan kembali, (5) Konfirmasi, (6) Analisis, (7) Pengusutan dan (8) Penelusuran.

Begitu juga dengan sifat atau jenis substantif, dimana ada tiga jenis pengujian substantif yang digunakan yakni : (1) pengujian rinci atau rincian saldo, (2) pengujian rinci atau rincian transaksi dan (3) prosedur analitis. Dalam penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif dilakukan jika resiko rendah maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau mendekati tanggal neraca. Adapun juga mengenai luas pengujian substantif yakni semakin rendah tingkat resiko yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti yang diperlukan.

### **2.2.3 Pelaporan**

Pada tahapan akhir dari audit sektor publik yakni pelaporan, pada pelaporan ini, perlu diperhatikan beberapa item diantaranya yakni (1) Tinjauan kertas kerja dan kesimpulan. Kertas kerja merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Kepemilikan kertas kerja sepenuhnya ada ditangan auditor (2) Kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja berhubungan erat dengan standar pelaporan dimana diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap tuntutan pemakai laporan keuangan dan sanksi lembaga profesi. (3) Isi kertas kerja. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang telah ditetapkan. Isi dokumentasi dari kertas kerja memperlihatkan pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal yang telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan, bukti audit yang telah diperoleh, prosedur yang telah diterapkan dan pengujian yang telah

dilaksanakan sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja yakni (1) Lengkap, (2) Teliti, (3) Ringkas, (4) Jelas dan (5) Rapi. Pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Auditor dibayar untuk melakukan pemeriksaan bukan melakukan penyalinan. Auditor dan asistennya sering memperoleh keterangan lisan dari klien dan karyawan klien. Pertanyaan yang belum terjawab jangan ditinggalkan tidak terjawab begitu saja. Pembuatan kertas kerja harus menulis semua persoalan relevan yang dihadapi selama pemeriksaan. Memiliki kriteria kertas kerja yang baik.

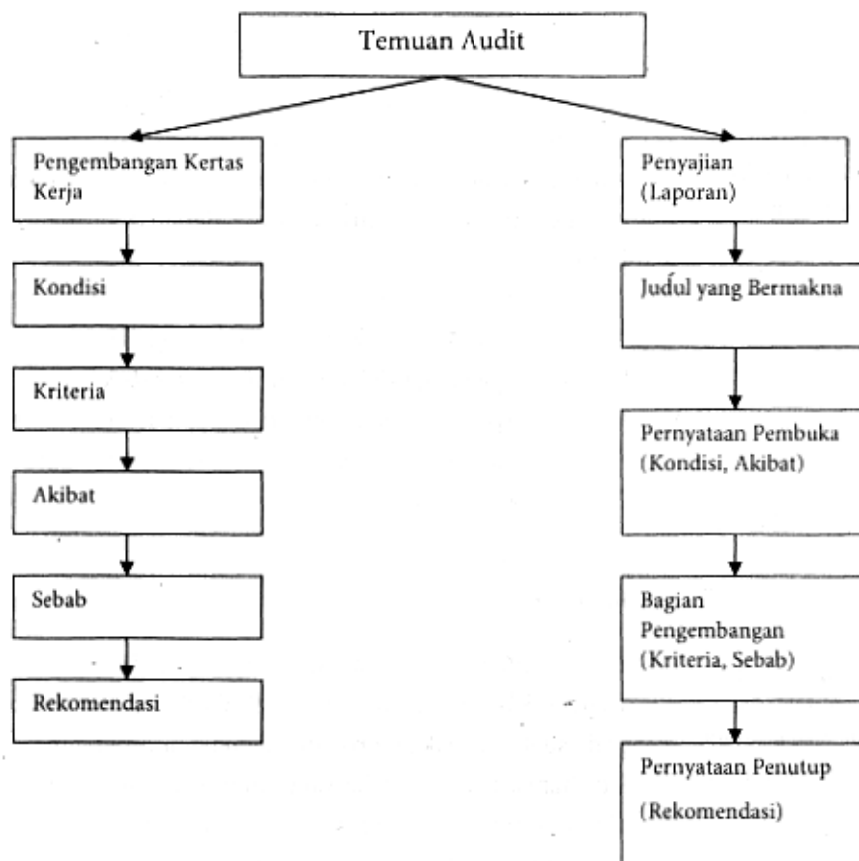
Jenis kertas kerja terdiri dari Program audit, Neraca saldo, Ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali, Daftar pendukung, Daftar utama, Memorandum audit serta dokumentasi informasi pendukung. Di susunan kertas kerja harus disajikan dalam susunan yang sistematis yakni terdiri dari : (a) Draf laporan audit, (b) Laporan keuangan independen, (c) Ringkasan informasi yang diperoleh, (d) Program audit, (e) Laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat, (f) Ringkasan jurnal penyesuaian, (g) Neraca saldo, (h) Daftar utama dan (i) Daftar pendukung.

Auditor harus menelaah kertas kerja yang dibuat oleh staf maupun asistennya. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik dan bukan milik pribadi auditor maupun klien. Jenis pengarsipan kertas kerja terdiri dari arsip permanen dan arsip sementara/kini. Memiliki hubungan antar kertas kerja audit.

Melaporkan berbagai temuan. Standar audit pemerintahan (SAP) membagi audit menjadi dua kelompok yaitu audit keuangan dan audit kinerja.

Jenis-jenis laporan audit terdiri dari : (1) Laporan audit tahunan, (2) Laporan audit triwulan, (3) Laporan kemajuan kinerja bulanan, (4) Laporan survey pendahuluan, (5) Laporan audit interim. Dalam pelaporan ini juga tergambar dengan jelas bentuk temuan. Bentuk temuan merupakan kertas kerja audit yang paling kritis, jika terdapat hal penting dan kritis auditor harus mempunyai waktu untuk mendokumentasikannya dengan hati-hati.

Berikut ini adalah sistematika temuan



Gambar 2.1 Sistematika Temuan

Sumber : Indra Bastian, 2007 Audit Sektor Publik

## **2.3 Definisi/Pengertian dan Ruang Lingkup**

### **2.3.1 Kualitas Auditor**

Hasil penelitian Deis dan Giroux (1992) menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Penelitian ini dilakukan atas empat hal yang dianggap mempunyai hubungan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Widagdo (2002) melakukan penelitian tentang atribut – atribut kualitas auditor oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. Terdapat 12 (dua belas) atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) pengalaman melakukan audit, (2) memahami industri klien, (3) responsif atas kebutuhan klien, (4) taat pada standar umum, (5) independensi, (6) sikap hati-hati, (7) komitmen terhadap kualitas audit, (8) keterlibatan pimpinan KAP, (9) melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, (10) keterlibatan komite audit, (11) standar etika yang tinggi, dan (12) tidak mudah percaya.

Hasil penelitian Widagdo (2002) menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas auditor yang berpengaruh terhadap kepuasan klien, antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati – hati, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya tidak berpengaruh terhadap kepuasan klien.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat terlihat bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan *due professional care*. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan.

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas

kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

### **2.3.2 Keahlian**

Bedard (1986) dalam Lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP.

Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Untuk itu APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekrutmen. Aturan tentang pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.

Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik – praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Dalam hal auditor melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu – ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas audit. APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing profesional education*) sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian



sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya.

Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit. Pendidikan profesional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus – kursus, program pelatihan di kantor sendiri dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengauditan.

APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan, dimana pimpinan APIP menggunakan arahan dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan lain – lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat merupakan aktuaris, penilai (*appraiser*), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.

### **2.3.3 Independensi**

Semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen berikut :

1. Status APIP dalam organisasi
2. Kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap objek audit.

Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditan dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditan terutama saling memahami diantara peran masing – masing lembaga.

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor dalam melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

Jika independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Auditor harus melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi adanya dan atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidakindependenan atau bias. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut.

Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi objektivitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut.

Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lama di kantor auditan guna membantu mereview kegiatan, program atau aktivitas auditan, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyetujui hal – hal yang merupakan tanggung jawab auditan.

Independensi pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK, BPKP, atau Akuntan Publik. Inspektorat provinsi merupakan bagian dari SKPD pada pemerintah provinsi. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat provinsi hanya dapat memberikan saran kepada Kepala Daerah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD – SKPD di Pemerintah Provinsi. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Kepala Daerah. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau BPKP, kedua lembaga ini berhak melakukan ekspose kepada pusat atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Perbedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi auditor di Inspektorat Provinsi.

#### **2.3.4 Etika**

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit.

Kode etika ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara : (1) Auditor dengan rekan sekerjanya, (2) Auditor dengan atasannya, dan (3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) serta (4) Auditor dengan masyarakat.

Pengertian etika menurut Firdaus (2005: 37) adalah perangkat prinsip moral atau nilai. Masing – masing orang memiliki perangkat nilai, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit.

Prinsip – prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai – nilai sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik dan ketanggugugatan (Firdaus, 2005 : 38).

Sejumlah besar nilai etika dalam masyarakat tidak dapat dimasukan dalam undang – undang karena sifat nilai tertentu yang memerlukan pertimbangan. Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak beretika sebagai perilaku yang berbeda dari sesuatu yang seharusnya dilakukan. Masing – masing orang menentukan apa yang dianggap tidak beretika, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Penting untuk memahami mengapa orang bertindak tidak beretika menurut kita.

Terdapat penyebab orang tidak beretika atau standar etika seseorang berbeda dari masyarakat secara keseluruhan atau seseorang memutuskan untuk bertindak semauanya yaitu : standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, dan seseorang memilih bertindak semauanya.

Manusia senantiasa dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Seringkali dilema etika yang berasal dari pilihan membawa kebaikan pada pihak lain. Dalam situasi seperti ini, orang harus mengajukan dua pertanyaan penting yaitu “kebaikan apa yang saya cari? Dan apa kewajiban saya dalam kondisi seperti ini? (Boyton dkk, 2003:97)

## 2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan antara lain yaitu :

Dopuch dan Simunic (1980) dan DeAngelo (1981) dalam Komalasari (2003) berargumen bahwa ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas auditor. *Economies of scale* KAP yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan *Security and Exchange Commission* (SEC) sebagai cara pengembangan dan pemasaran keahlian KAP tersebut. KAP diklasifikasikan menjadi dua yaitu kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP The Big Five, dan kantor akuntan publik lainnya. Auditor beroperasi dalam lingkungan yang berubah, ketika biaya keagenan tinggi, manajemen mungkin berkeinginan pada kualitas audit yang lebih tinggi untuk menambah kredibilitas laporan, hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pemantauan.

Alim (2007), penelitiannya berjudul pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor sebagai etika editor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sementara itu interaksi kompetensi dan etika auditor

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

Alia (2001), juga melakukan penelitian mengenai persepsi auditor terhadap kualitas audit mengungkapkan bahwa hanya pengetahuan saja yang berpengaruh terhadap kualitas auditor, pengalaman auditor ternyata tidak banyak memberikan kontribusi untuk meningkatkan keahlian auditor, berarti pengalaman tidak pula berpengaruh terhadap kualitas auditor. Hasil penelitiannya juga menunjukkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap keahlian auditor, sehingga pengalaman tidak berpengaruh pula terhadap kualitas auditor, jumlah klien yang banyak dan jenis perusahaan (go publik atau belum go publik) tidak dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas audit yang dilakukan auditor.

Huntoyungo (2009), penelitian pada Inspektorat Provinsi Gorontalo mengenai Faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas audit dimana hasil penelitiannya menggambarkan bahwa keahlian dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kecermatan dan keseksamaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

Kitta (2009), penelitian pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor dimana hasil penelitiannya menggambarkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit.

Tabel 2.1 Tinjauan atas penelitian terdahulu

<b>Peneliti Terdahulu</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Alim (2007)	Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor sebagai etika editor sebagai variabel moderasi	Kompetensi dan independensi sebagai variabel independen. Kualitas auditor sebagai variabel dependen, dan etika auditor sebagai variabel moderasi	kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sementara itu interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor
Alia (2001)	Persepsi auditor terhadap kualitas auditor	Variabel independen : pengalaman Variabel dependen : Kualitas Auditor Variabel Intervening : Keahlian auditor	Pengalaman tidak berpengaruh terhadap keahlian auditor, sehingga pengalaman tidak berpengaruh pula terhadap kualitas auditor
Huntoyungo (2009)	Faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas audit di Inspektorat Provinsi Gorontalo	Keahlian, Independensi, kecermatan dan keseksamaan sebagai variabel independen. Kualitas auditor sebagai variabel dependen	Keahlian dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kecermatan dan keseksamaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.
Kitta (2009)	Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Kompetensi dan independensi sebagai variabel independen. Kualitas auditor sebagai variabel dependen, dan etika auditor sebagai variabel moderasi	Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini bahwa Keahlian, Independensi dan Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kausal, Umar (2008) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung.

Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis keahlian, independensi dan etika sebagai variabel independen dan kualitas auditor sebagai variabel dependen pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Sofifi No.1, Gedung Kantor Gubernur Lantai 4 Provinsi Maluku Utara. Jangka waktu penelitian dari bulan Juni 2011 sampai dengan Juli 2011.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang berjumlah 52 (lima puluh dua) orang berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara.-



Jenis penelitian ini adalah sensus, menurut Erlina dan Mulyani (2007) jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus. Sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen. Metode yang digunakan adalah metode survey, menurut Ghazali dan Ikhsan (2006) yaitu merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (1999), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini yang akan diberikan kuesioner adalah seluruh Auditor/Pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang berjumlah 52 (lima puluh dua) orang.

Tahapan dalam penyebaran dan pengumpulan kuesioner dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh Auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi, kemudian menunggu pengisian tersebut. Tahap kedua adalah pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh Auditor Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pengolahan data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dikirim, sedangkan sumber data berasal dari jawaban para Auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dirancang sendiri oleh peneliti, kuesioner ini mengacu pada variabel dan indikator penelitian yang peneliti ambil berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

Sebelum kuesioner disebar ke responden terlebih dahulu dilakukan uji pratest (uji coba sebelum penelitian yang sebenarnya dilakukan). Menurut Kuncoro (2003) setelah instrumen disusun dalam bentuk draft maka uji pratest sebaiknya dilakukan pada sejumlah responden yang sama dengan responden yang sebenarnya.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang disusun sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

### **3.6 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Keahlian ( $X_1$ ), Independensi ( $X_2$ ), dan Etika ( $X_3$ ) yang merupakan faktor – faktor dari kualitas

auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan satu variabel dependen yaitu Kualitas Auditor (Y).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval. Keseluruhan uraian mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Dependen			
Kualitas Auditor (Y)	Adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tupoksi dengan efektif,</li> <li>2. Mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan,</li> <li>3. Melaksanakan perencanaan, koordinasi</li> <li>4. Penilaian efektifitas tindak lanjut audit,</li> <li>5. Konsistensi laporan audit</li> </ol>	Interval
Independen			
Keahlian (X <sub>1</sub> )	Auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang pendidikan</li> <li>2. Memiliki kompetensi teknis</li> <li>3. Memiliki sertifikasi JFA dan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan</li> </ol>	Interval

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Independensi (X <sub>2</sub> )	Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya	1. Memiliki objektivitas 2. Memiliki kejujuran 3. Tidak mengkompromikan kualitas	Interval
Etika (X <sub>3</sub> )	Auditor harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit.	1. Auditor dengan rekan sekerjanya 2. Auditor dengan atasannya 3. Auditor dengan objek pemeriksanya 4. Auditor dengan masyarakat	Interval

### 3.7 Model dan Teknik Analisis Data

#### 3.7.1 Model Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Menurut Sugiyanto (2004) analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda adalah :  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Keterangan : Y = Kualitas Auditor

X<sub>1</sub> = Keahlian

X<sub>2</sub> = Independensi

$X_3$	= Etika
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien Regresi
$e$	= Error

### 3.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan model regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang dimasukkan ke dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, pengujian asumsi klasik, statistik deskriptif dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.

### 3.7.3 Uji Kualitas Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu uji reliabilitas dan validitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing – masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

#### 1. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak

oleh responden yang sama (Umar, 2000). Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *cronbach's alpha* dengan bantuan software SPSS. *Cronbach's alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Menurut Supramono dan Utami (2004) secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *cronbach's alpha*  $> 0,6$ .

## 2. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang disusun benar – benar akurat sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Menurut Umar (2000) uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan – pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Validitas dalam hal ini merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. (Ghozali dan Ikhsan, 2006). Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dan setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan. Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item – Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ( $r$  hitung  $> r$  tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid.

### 3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Menurut Lubis (2007) dalam membuat uji asumsi klasik harus menggunakan data yang akan digunakan dalam uji regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Adapun uji asumsi klasik yang dipakai yaitu uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, sedangkan uji Autokorelasi tidak digunakan karena data penelitian merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Umar (2000) uji Normalitas berguna untuk mengetahui variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan 2 metode pengujian yaitu p\_plot dan diagram histogram.

Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, analisis non parametrik termasuk model – model regresi yang digunakan. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis (2007) data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal.

Kenormalan data juga dapat dilihat dengan melihat diagram histogram dimana keputusan/pengambilan kesimpulan yaitu jika grafik histogram tidak condong ke kiri dan ke kanan maka data penelitian berdistribusi normal dan sebaliknya.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Menurut Singgih Santoso (2000) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu :

Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai *Toleransi* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas  $VIF = 1/Tolerance$ , jika  $VIF = 0$  maka  $Tolerance = 1/10$  atau 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Umar (2000) model regresi yang baik adalah model yang heteroskedastisitas. Cara memprediksinya adalah :



- a. Titik–titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola (Lubis, 2007)

### **3.7.5 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang paling utama dan data demografi responden. (Ghazali dan Ikhsan, 2006).

### **3.7.6 Uji Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai variabel yang dipakai. Kuesioner diarahkan untuk jawaban positif atau negatif. Interval jawaban terdiri dari 1 sampai dengan 5, dan jawaban point 4 dan point 5 merupakan jawaban positif karena jawaban point 4 adalah setuju dan point 5 adalah sangat setuju. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas auditor digunakan pengujian hipotesis dengan uji  $F$  dan uji  $t$ .

## 1. Uji $F$

Uji  $F$  menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah – langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji  $F$  adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ , Keahlian, Independensi dan Etika tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor.

$H_a : \beta \neq 0$ , Keahlian, Independensi dan Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor.

Pada tabel ANOVA didapat uji  $F$  yang menguji semua sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan  $df_1$  dan  $df_2$  untuk mencari nilai  $F$  tabel. Nilai  $F$  tabel dapat dilihat dengan menggunakan  $F$  tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas  $>$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
- b. Jika probabilitas  $<$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

## 2. Uji $t$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji  $t$ , yaitu menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa

variabel lain dianggap konstan. Adapun langkah – langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji  $t$  adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ , Keahlian, Independensi dan Etika tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor.

$H_a : \beta \neq 0$ , Keahlian, Independensi dan Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor.

Untuk mencari  $t$  tabel dengan  $df = N-2$ , taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai  $t$  tabel dapat dilihat dengan menggunakan  $t$  tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
- b. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas  $>$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak
- b. Jika probabilitas  $<$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM SKPD**

### **INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **4.1 Gambaran Umum Inspektorat**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh inspektorat dikoordinasikan oleh Kepala Inspektorat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, Kepala Inspektorat, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut dengan Inspektur Provinsi, dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat adalah kegiatan pemeriksaan (audit), yang meliputi:

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan.
2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi.
3. Pemeriksaan tugas pembantuan.
4. Pemeriksanaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Selain pemeriksaan tersebut, auditor Inspektorat dapat juga melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai indikasi kemungkinan terjadinya tindak penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dikoordinasikan oleh Kepala Inspektorat, yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, kepala Inspektorat, baik di

tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut dengan Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi, dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Setiap auditor di inspektorat daerah diharapkan dapat menerapkan kecermatan profesinya dengan memadai. Dengan adanya berbagai perubahan keadaan baik lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan inspektorat itu sendiri, para auditor inspektorat juga dituntut untuk lebih memainkan peran pentingnya sebagai konsultan internal pemerintah daerah dan mitra kerja yang efektif dari para kepala daerah dan aparat pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerahnya masing-masing. Begitu pula, dengan melihat berbagai kegiatan pengawasan yang harus dijalankan, para auditor atau pejabat pengawas pemerintah di inspektorat dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasannya.

#### **4.2 Visi, Misi dan Tupoksi Inpektorat**

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah

dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk : pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Inspektorat Propinsi Maluku Utara mempunyai visi sebagai berikut :  
 ”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Baik serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Guna mencapai visi tersebut di atas, maka misi Inspektorat Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya pemerintah daerah yang efisien dan efektif, bersih bebas dari KKN.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan pemeriksa.
4. Konsisten pemberian sanksi dan hukuman.
5. Peningkatan transparansi.
6. Peningkatan kerjasama dan keterpaduan seluruh unsur pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau

sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi/Kab/Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi/Kab/Kota.

Uraian Tugas Inspektorat Propinsi Maluku Utara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Propinsi Maluku Utara menegaskan bahwa Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah propinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah disebutkan, inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;

- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### **4.3 Struktur Organisasi**

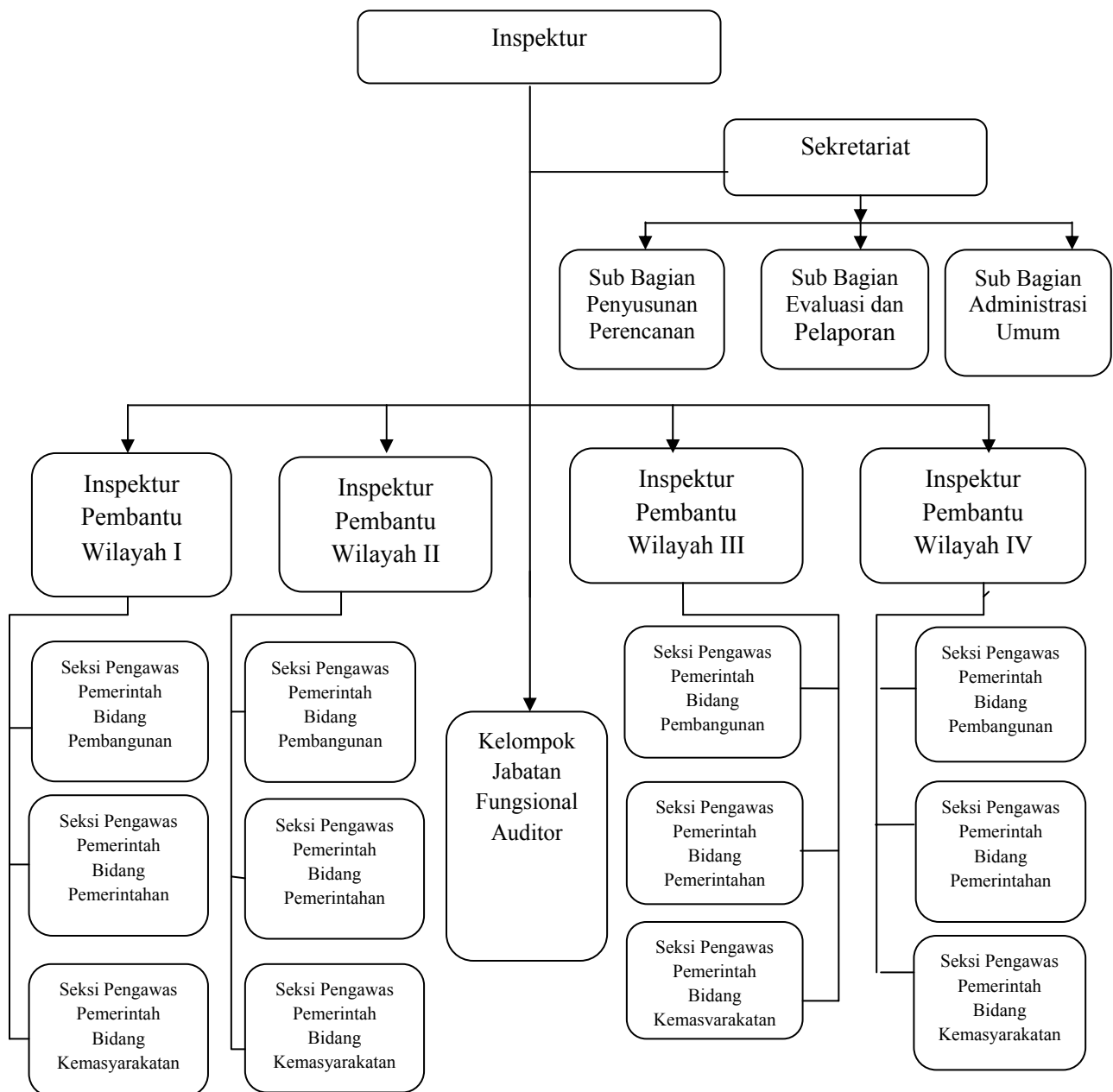
Susunan organisasi Inspektorat Propinsi Maluku Utara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 8 tahun 2008 terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Subbagian Penyusunan Perencanaan;
  - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Subbagian Administrasi umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
  - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah;
  - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
  - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah;
  - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
  - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah;
  - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;



6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah;
  - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Propinsi Maluku Utara sesuai Perda Prop. Maluku Utara Nomor 8/2008 tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Propinsi Maluku Utara.**

Sumber : Inspektorat Propinsi Maluku Utara, 2011

Jumlah pemeriksa pada Inspektorat Propinsi Maluku Utara menurut Daftar Nominatif Per 30 Juni 2011 adalah 52 orang dengan komposisi sebagai berikut:

a. Menurut status pemeriksaan:

Pemeriksa Daerah/auditor sebanyak = 52 orang

b. Menurut Golongan:

1) Golongan IV = 4 orang

2) Golongan III = 46 orang

3) Golongan II = 2 orang

c. Menurut Pendidikan:

1) S 2 = 5 orang

2) S 1 = 45 orang

3) Sarjana Muda = 2 orang

4) SLTA = - orang

e. Menurut Jenis Kelamin

1) Laki-laki = 30 orang

2) Perempuan = 22 orang

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Deskripsi Data**

##### **5.1.1 Deskripsi lokasi**

Pada penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang beralamatkan di Jalan Lintas Halmahera Gosale Puncak Kantor Gubernur Lantai 4 Sofifi yang secara geografis terpisah dengan pusat kota Ternate yang berada di pulau Ternate. Mengingat hampir 90 % semua pegawai / responden berdomisili di pulau Ternate dan sisanya diluar pulau Ternate selain pulau Halmahera, maka satu-satunya transportasi adalah melalui jalur laut, baik menggunakan kapal ferry maupun speedboat yang telah menjadi angkutan laut umumnya.-

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner pada 52 orang auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Dari 52 kuesioner yang disebarkan, seluruhnya kembali dan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 5.1 Pengumpulan Data

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner yang disebar/diberikan	52	100 %
Kuesioner yang kembali	52	100 %
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	52	100 %

### 5.1.2 Karakteristik Responden

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar dalam tabel 5.2 memperlihatkan bahwa auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang paling banyak berjenis kelamin pria sebanyak 30 orang (57,70%) dan berjenis kelamin wanita sebanyak 22 orang (42,30%)

Tabel 5.2. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Frequency	Percent
Valid	Pria	30	57.7
	Wanita	22	42.3
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100.0</b>

Sumber data : Data primer diolah 2011

Hasil penelitian berdasarkan masa kerja tabel 5.3 memperlihatkan bahwa auditor/pemeriksa Provinsi Maluku Utara mempunyai masa kerja paling banyak diatas 20 tahun sebanyak 2 orang (3,80%), lalu 16 tahun s/d 20 tahun sebanyak 10 orang (19,20%), lalu 11 tahun s/d 15 tahun sebanyak 19 orang (36,5%), dan 5 tahun s/d 10 tahun sebanyak 4 orang (7,70%) serta dibawah 5 tahun sebanyak 17 orang (32,7%).

Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lamanya Bekerja		Frequency	Percent
Valid	< 5 tahun	17	32.7
	5 s/d 10 tahun	4	7.7
	11 s/d 15 tahun	19	36.5
	16 s/d 20 tahun	10	19.2
	> 20 tahun	2	3.8
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100.0</b>

Sumber data : Data primer diolah 2011

Hasil penelitian berdasarkan umur tabel 5.4 memperlihatkan bahwa auditor/pemeriksa Inspektorat Provinsi Maluku Utara memiliki usia antara 51 tahun s/d 60 tahun sebanyak 3 orang (5,80%), lalu 41 tahun s/d 50 tahun sebanyak 10 orang (19,20%), dan 31 tahun s/d/ 40 tahun sebanyak 22 orang ( 42,30%) serta 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 17 orang (32,70%)

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur		Frequency	Percent
Valid	20 s/d 30 tahun	17	32.7
	31 s/d 40 tahun	22	42.3
	41 s/d 50 tahun	10	19.2
	51 s/d 60 tahun	3	5.8
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100.0</b>

Sumber data : Data primer diolah 2011

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan tabel 5.5 memperlihatkan bahwa auditor/pemeriksa Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat pendidikan tertinggi Pasca sarjana/magister sebanyak 5 orang (9,62%), lalu sarjana sebanyak 45 orang (86.60%) dan tingkat pendidikan minimal diploma/sarjana muda sebanyak 2 orang (3,80%).

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan		Frequency	Percent
Valid	Diploma/Sarjana Muda (D-III)	2	3.80
	Sarjana (S1)	45	86.60
	Magister (S2)	5	9.62
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100.0</b>

Sumber data : Data primer diolah 2011

## 5.2 Hasil Analisa Data

### 5.2.1 Uji Kualitas Data

Sesuai dengan ketentuan dan kriteria, dimana sebelum daftar pertanyaan diberikan pada responden, daftar pertanyaan telah diuji sebelumnya. Uji coba pratest telah dilakukan terhadap instrumen penelitian ini dan telah memenuhi syarat untuk dijadikan kuesioner namun tidak ditampilkan dalam penelitian ini.

#### A. Uji Validitas

Dengan mempergunakan bantuan dari *software* SPSS, maka pengujian validitas instrumen, dimana nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Coreccted Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang didapat lebih besar dari pada angka kritik ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini angka kritik adalah  $N - 2 = 52 - 2 = 50$  dengan taraf signifikan 5 % maka angka kritik untuk uji coba validitas dalam penelitian ini adalah 0,273. Dengan demikian maka berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai *Coreccted Item-Total Correlation* bernilai positif dan diatas nilai  $r_{tabel}$  0,273 yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas variabel Kualitas Auditor ( $Y_1$ ), Keahlian ( $X_1$ ), Independensi ( $X_2$ ) dan Etika ( $X_3$ ) diuraikan pada tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6 Uji Validitas Variabel Penelitian

Instrumen Variabel	Butir Instrumen	r hitung	r tabel	Ket
<b>Kualitas Auditor (Y)</b>	1. APIP melakukan Tupoksi dengan efektif	0,504	0,273	valid
	2. APIP mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	0,608	0,273	valid
	3. APIP melaksanakan koordinasi audit	0,884	0,273	valid
	4. APIP melaksanakan perencanaan audit	0,869	0,273	valid
	5. APIP melakukan penilaian efektifitas tindak lanjut hasil dan konsistensi penyajian laporan hasil audit	0,884	0,273	valid
<b>Keahlian (X<sub>1</sub>)</b>	1. APIP memiliki tingkat pendidikan formal minimal starta satu (S1)	0,841	0,273	valid
	2. APIP mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dibidang auditing, Akuntansi sektor publik dan keuangan daerah	0,673	0,273	valid
	3. APIP memiliki keahlian di bidang auditing	0,841	0,273	valid
	4. APIP memiliki keahlian di bidang akuntansi sektor publik, keuangan dan lain – lain	0,562	0,273	valid
	5. APIP mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan	0,507	0,273	valid
	6. APIP memiliki ketrampilan dan berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan auditan/obrik	0,562	0,273	valid
<b>Independensi (X<sub>2</sub>)</b>	1. APIP bebas dari intervensi dan mendapat dukungan dari pimpinan Tertinggi	0,524	0,273	valid
	2. APIP harus memiliki sikap netral dan tidak bias	0,501	0,273	valid
	3. APIP menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit	0,286	0,273	valid
	4. APIP tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan/obrik seperti hubungan aosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya	0,767	0,273	valid
	5. Auditor melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi jika Independensi atau objektivitas terganggu baik secara fakta maupun penampilan	0,674	0,273	valid
	6. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menghadapi gangguan terhadap konflik kepentingan	0,767	0,273	valid



<b>Etika (X3)</b>	1. APIP melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab	0,478	0,273	valid
	2. APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi intern	0,591	0,273	Valid
	3. APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap auditan/obrik	0,460	0,273	Valid
	4. APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap masyarakat	0,633	0,273	Valid

Sumber data : Data primer diolah 2011

## B. Uji Reliabilitas

Pada pengujian ini dilakukan guna menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Pengujian reabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar,2000). Dengan menggunakan bantuan *software* SPSS maka koefisien *cronbach's alpha* merupakan uji reabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Menurut supramono dan utami (2004) secara umum suatu instrumen dikatakan realibel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ . Hal ini sebagaimana tergambar pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7 Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Auditor (Y)	0,888	0,6	Reliabel
Keahlian (X <sub>1</sub> )	0,852	0,6	Reliabel
Independensi (X <sub>2</sub> )	0,815	0,6	Reliabel
Etika (X <sub>3</sub> )	0,743	0,6	Reliabel

Sumber data : Data primer diolah 2011

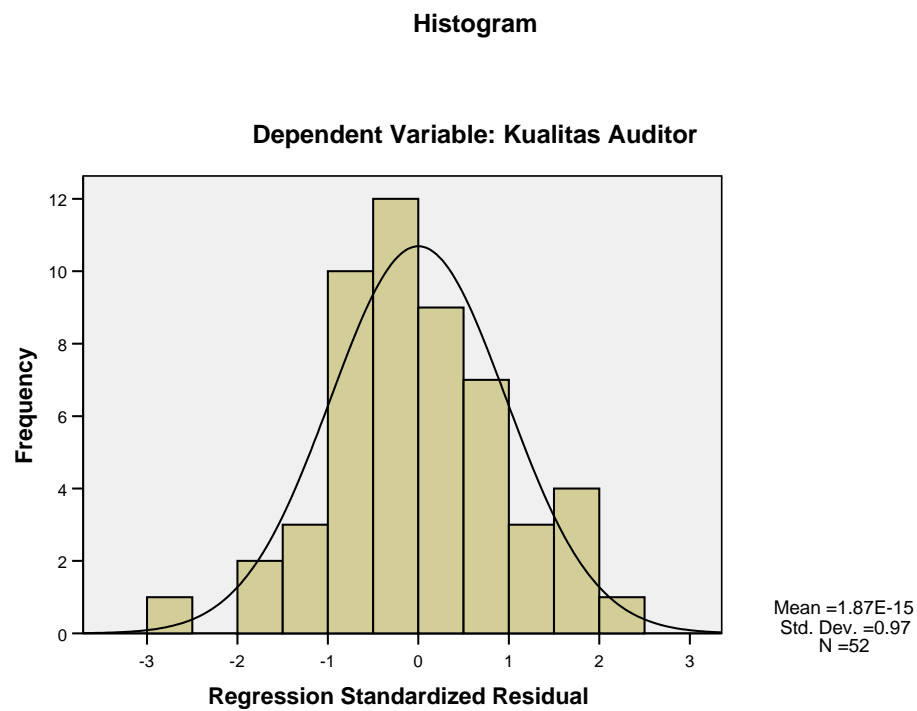
Dari penyajian tabel diatas, maka seluruh instrumen dinyatakan reliabel, dimana hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6.

### **5.2.2 Uji Asumsi Klasik**

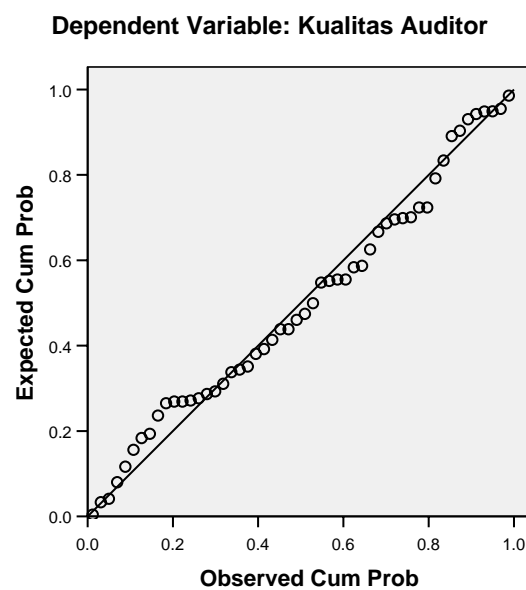
Di dalam penelitian ini, adapun uji asumsi klasik yang dipakai yaitu uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, sedangkan uji Autokorelasi tidak digunakan karena data penelitian merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Pengujian uji asumsi klasik ini meliputi :

#### **A. Uji Normalitas Data**

Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen (terkait) dan variabel independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan normal p\_plot dan diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal. Adapun grafiknya adalah sebagai berikut :



Gambar 5.1 Diagram Histogram

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Gambar 5.2. Normal P-Plot

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal, dimana data terlihat menyebar mengikuti diagonal dan diagram histogram yang tidak condong ke kiri dan ke kanan sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

## B. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (*independen*) saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel *independen*. VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi. Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Berikut tabel 5.8 Uji Multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Uji Multikolinieritas

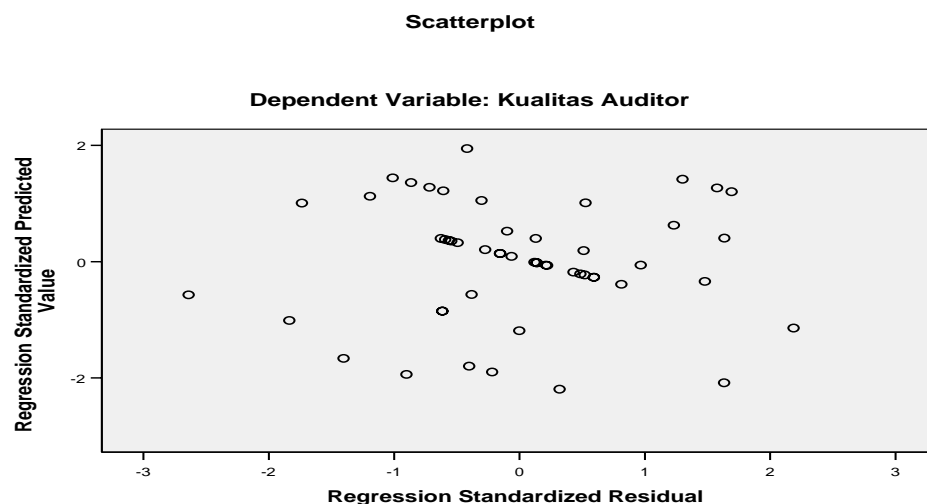
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Keahlian	.543	1.841
	Independensi	.567	1.764
	Etika	.919	1.088

Sumber data : Data primer diolah 2011

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa dari ketiga variabel *independen* dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.

### C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah gambar untuk melihat ada atau tidak adanya heteroskedastisitas.



Gambar 5.3. Scatterplot

Dengan menggunakan grafik diatas, maka dapat disimpulkan dimana dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- Jika tidak ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Dengan demikian maka pada grafik diatas menunjukan tidak ada pola yang jelas dan menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel penelitian, sehingga asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi.

### 5.2.3 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian

#### A. Variabel Keahlian ( $X_1$ )

Dalam penelitian ini diperoleh data untuk variabel keahlian sebagaimana tergambar pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 Deskripsi variabel keahlian ( $X_1$ )

Deskripsi	Mean	Mode	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Variance
Keahlian 1	4.02	4	3	5	.700	.490
Keahlian 2	3.90	4	3	5	.569	.324
Keahlian 3	4.02	4	3	5	.700	.490
Keahlian 4	4.13	4	1	5	.864	.746
Keahlian 5	3.50	4	2	5	.960	.922
Keahlian 6	4.13	4	1	5	.864	.746

Sumber data : Data primer diolah 2011

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa :

1. APIP memiliki tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S1) : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,02 dan standar deviasi 0,700
2. APIP mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dibidang auditing, Akuntansi sektor publik dan keuangan daerah : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,90 dan standar deviasi 0,569

3. APIP memiliki keahlian di bidang auditing : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,02 dan standar deviasi 0,700
4. APIP memiliki keahlian di bidang akuntansi sektor publik, keuangan dan lain – lain : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 1 dengan rata-rata 4,13 dan standar deviasi 0,864
5. APIP mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 2 dengan rata-rata 3,50 dan standar deviasi 0,960
6. APIP memiliki ketrampilan dan berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan auditan/obrik : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 1 dengan rata-rata 4,13 dan standar deviasi 0,864

#### **B. Variabel Independensi ( $X_2$ )**

Dalam penelitian ini diperoleh data untuk variabel Independensi sebagaimana tergambar pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 Deskripsi variabel independensi ( $X_2$ )

Deskripsi	Mean	Mode	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Variance
Independensi 1	4.31	5	3	5	.755	.570
Independensi 2	3.90	4	3	5	.569	.324
Independensi 3	4.25	5	3	5	.738	.544
Independensi 4	4.29	5	3	5	.723	.523
Independensi 5	4.00	4	2	5	.714	.510
Independensi 6	4.29	5	3	5	.723	.523

Sumber data : Data primer diolah 2011

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa :

1. APIP bebas dari intervensi dan mendapat dukungan dari pimpinan Tertinggi : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,13 dan standar deviasi 0,755
2. APIP harus memiliki sikap netral dan tidak bias : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,90 dan standar deviasi 0,569
3. APIP menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,25 dan standar deviasi 0,738
4. APIP tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan/obrik seperti hubungan aosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,29 dan standar deviasi 0,723
5. Auditor melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi jika Independensi atau objektivitas terganggu baik secara fakta maupun penampilan : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 2 dengan rata-rata 4,00 dan standar deviasi 0,714
6. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menghadapi gangguan terhadap konflik kepentingan : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,29 dan standar deviasi 0,723



### C. Variabel Etika (X<sub>3</sub>)

Dalam penelitian ini diperoleh data untuk variabel Etika sebagaimana tergambar pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 Deskripsi variabel Etika (X<sub>3</sub>)

Deskripsi	Mean	Mode	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Variance
Etika 1	3.75	3	3	5	.738	.544
Etika 2	3.87	3	3	5	.793	.629
Etika 3	3.81	4	3	5	.742	.551
Etika 4	3.75	4	3	5	.653	.426

Sumber data : Data primer diolah 2011

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa :

1. APIP melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,75 dan standar deviasi 0,738
2. APIP bersikap dan berperilaku sesuai dnegan kode etik terhadap organisasi intern : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,87 dan standar deviasi 0,793
3. APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap auditan/obrik : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,81 dan standar deviasi 0,742
4. APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap masyarakat : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,75 dan standar deviasi 0,653

#### D. Variabel Kualitas Auditor (Y)

Dalam penelitian ini diperoleh data untuk variabel Kualitas Auditor sebagaimana tergambar pada tabel 5.12 berikut ini :

Tabel 5.12 Deskripsi variabel Kualitas Auditor (Y)

Deskripsi	Mean	Mode	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Variance
Kualitas Auditor 1	4.00	4	3	5	.626	.392
Kualitas Auditor 2	4.04	4	2	5	.791	.626
Kualitas Auditor 3	3.90	4	3	5	.569	.324
Kualitas Auditor 4	4.02	4	3	5	.700	.490
Kualitas Auditor 5	3.90	4	3	5	.569	.324

Sumber data : Data primer diolah 2011

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa :

1. APIP melakukan Tupoksi dengan efektif : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,00 dan standar deviasi 0,626
2. APIP mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 2 dengan rata-rata 4,04 dan standar deviasi 0,791
3. APIP melaksanakan koordinasi audit : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,90 dan standar deviasi 0,569
4. APIP melaksanakan perencanaan audit : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,02 dan standar deviasi 0,700
5. APIP melakukan penilaian efektifitas tindak lanjut hasil dan konsistensi penyajian laporan hasil audit : jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,90 dan standar deviasi 0,569

### 5.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis bahwa keahlian, independensi dan etika berpengaruh terhadap kualitas auditor dengan menggunakan uji F dan uji t.

#### 5.3.1 Pengujian Hipotesis dengan Uji F

Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.13 dibawah ini :

Tabel 5.13. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.850	3	3.950	56.562	.000(a)
	Residual	3.352	48	.070		
	Total	15.202	51			

Sumber data : Data primer diolah 2011

Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini diketahui nilai uji F sebesar 56,562 dengan signifikansi 0,000. Dimana disyaratkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap Kualitas Auditor (Y). Hal tersebut berarti jika Keahlian ( $X_1$ ), Independensi ( $X_2$ ) dan Etika ( $X_3$ ) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada kenaikan Kualitas Auditor (Y), sebaliknya jika Keahlian

( $X_1$ ), Independensi ( $X_2$ ) dan Etika ( $X_3$ ) secara bersama-sama mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan Kualitas Auditor ( $Y$ ).

### 5.3.2 Pengujian Hipotesis dengan Uji $t$

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, pembahasan akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan memperhatikan nilai  $t$  hitung dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen dengan tingkat kepercayaan 95% atau pada  $\alpha$  5%. Dengan syarat apabila nilai variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabila tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji  $t$  digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

Adapun metode dalam penentuan  $t$  tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan  $df=n-k-1$  (dalam penelitian ini  $df=52-5-1=46$ ), sehingga didapat nilai  $t$  tabel sebesar 2,013 disajikan dalam tabel 5.14 sebagai berikut :

Tabel 5.14 Nilai  $t$  hitung

Variabel	$t$ hitung	$t$ Tabel	Signifikansi	Keputusan
Keahlian ( $X_1$ )	7.083	2,013	.000	Hipotesis Terbukti
Independensi ( $X_2$ )	3.246	2,013	.002	Hipotesis Terbukti
Etika ( $X_3$ )	1.104	2,013	.275	Hipotesis Tidak Terbukti

Sumber data : Data primer diolah 2011

Dari tabel 5.14 diatas diketahui nilai  $t$  hitung dari masing-masing variabel independen. Dari nilai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel. Karena nilai  $t$  hitung dalam penelitian ini lebih besar dari  $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dengan kata lain keahlian, independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor sedangkan etika berdasarkan  $t$  hitungnya tidak berpengaruh.

Selain itu pengujian hipotesis secara parsial juga dapat dianalisis nilai signifikansi berada dibawah 0,05 terkecuali variabel etika diatas 0,05 yakni 0,275 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial untuk masing-masing variabel bebas yakni keahlian dan independensi berpengaruh signifikan pada tingkat alpha 5%.

#### 5.4 Hasil Persamaan Regresi

Untuk mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi analisis regresi maka digunakan bentuk persamaan. Persamaan atau model tersebut berisi konstanta dan koefisien-koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian dengan bantuan program SPSS dilakukan pengolahan data sehingga didapat persamaan akhir sebagai berikut :

$$Y = 0,210 + 0,595X_1 + 0,314X_2 + 0,077X_3$$

Pada model regresi ini, nilai konstanta yang tercantum sebesar 0,210 dapat diartikan jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, secara rata-rata variabel diluar model tetap akan meningkatkan kualitas auditor sebesar 0,210 satuan

Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_1$  sebesar 0,595 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel keahlian ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap kualitas auditor ( $Y$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ketika keahlian mengalami peningkatan sebesar satu satuan, kualitas auditor juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,595 satuan.

Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_2$  sebesar 0,314 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel keahlian ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kualitas auditor ( $Y$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ketika keahlian mengalami peningkatan sebesar satu satuan, kualitas auditor juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,314 satuan.

Nilai besaran koefisien regresi  $\beta_3$  sebesar 0,077 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel etika ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap kualitas auditor ( $Y$ ). Hal ini menunjukkan bahwa ketika etika mengalami peningkatan sebesar satu satuan, kualitas auditor juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,077 satuan.

#### **5.4.1 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila ( $R^2$ )  $> 50\%$ . Dalam penelitian ini besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,779 (77,90%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 77,90% variasi variabel terikat yaitu kualitas auditor ( $Y$ ) pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu variabel keahlian ( $X_1$ ), independensi ( $X_2$ ) dan etika ( $X_3$ ) sedangkan sisanya 22,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Demikian juga jika dilihat dari nilai adjusted  $R^2$  yang bernilai 0,766 yang artinya nilai  $R^2$  yang disesuaikan terhadap variabel bebas yang. Berarti 76,60% variabel bebas dapat menjelaskan

variabel terikatnya sedangkan sisa 23,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut :

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883(a)	.779	.766	.264	1.754

Sumber data : Data primer diolah 2011

## 5.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa keahlian, independensi dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor secara simultan namun untuk etika tidak secara parsial dimana keseluruhan variabel keahlian dan idenpendensi telah terbukti ( $H_0$  ditolak) dan item etika ( $H_a$  diterima). Dari hasil ini dapat dilihat juga bahwa semakin baik/tinggi keahlian dan independensi terkecuali etika tentunya memberikan kontribusi yang baik/tinggi terhadap kualitas auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini sejalan dengan Kitta (2009), Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kualitas audit. Hal ini sejalan disebabkan dilakukan karena penelitian dilakukan pada instansi pemerintah serta menggunakan peraturan yang sama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit pada Inspektorat Prov. Sulsel, hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi dan independensi yang baik.
2. Idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kualitas audit.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alia(2001) yang berjudul Persepsi auditor terhadap kualitas auditor dimana hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap keahlian auditor, sehingga pengalaman tidak berpengaruh pula terhadap kualitas auditor. Perbedaan ini disebabkan penelitian yang dilakukan Alia pada perusahaan swasta sedangkan peneliti melakukan penelitian pada instansi pemerintah.

Sedangkan dalam penelitian saya menyatakan : Secara parsial keahlian, independensi dan etika masing – masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas auditor inspektorat adalah keahlian.

Fenomena yang terjadi pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara menggambarkan bahwa auditor memiliki kualitas yang baik jika adanya peningkatan keahlian dalam pemeriksaan, sedangkan independensi dan etika merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas, sehingga keahlianlah yang paling utama dalam melakukan pemeriksaan, karena auditor Inspektorat Provinsi



Maluku Utara belum sepenuhnya dibekali keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugas.

#### **5.5.1 Pengaruh Keahlian terhadap Kualitas Auditor**

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh keahlian terhadap kualitas auditor adalah positif dan signifikan. Posisi terlihat dari koefisien regresi keahlian sebesar 0,595 dan signifikan karena nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $7,083 > 2,013$ ).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh keahlian adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain keahlian yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila keahlian rendah/buruk maka kualitas auditor akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa keahlian mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas auditor.

#### **5.5.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Auditor**

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh independensi terhadap kualitas auditor adalah positif dan signifikan. Posisi terlihat dari koefisien regresi keahlian sebesar 0,314 dan signifikan karena nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $3,246 > 2,013$ ).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh independensi adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain keahlian yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila independensi rendah/buruk maka kualitas auditor akan rendah/buruk.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa independensi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas auditor.

### **5.5.3 Pengaruh Etika terhadap Kualitas Auditor**

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh etika terhadap kualitas auditor adalah positif namun tidak signifikan. Posisi terlihat dari koefisien regresi keahlian sebesar 0,077 dan tidak signifikan karena nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $1,104 < 2,013$ ).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh etika adalah searah dengan kualitas auditor atau dengan kata lain keahlian yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas auditor yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila etika rendah/buruk maka kualitas auditor akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa etika tidak mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas auditor.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara simultan keahlian, independensi dan etika secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor
2. Secara parsial keahlian dan independensi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor namun tidak untuk etika dimana tidak signifikan terhadap kualitas auditor.
3. Penelitian ini sejalan dengan Alim (2007), penelitiannya berjudul Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor sebagai etika editor sebagai variabel moderasi, dengan Huntayungo (2009) pada penelitiannya yang berjudul faktor – faktor yang berpengaruh pada kualitas audit di Inspektorat Provinsi Gorontalo dan dengan penelitian Kitta (2009) dengan judul Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

## 6.2 Saran

1. Penelitian ini hanya melibatkan satu institusi saja, yaitu Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan kesimpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan tidak dapat digeneralisasikan ke Inspektorat se Indonesia
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan – kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius dan responden yang menjawab asal – asalan dan tidak jujur serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden.
3. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap kualitas auditor pada penelitian ini hanya sebatas pengaruh keahlian, independensi dan etika sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas auditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. Nizarul 2007, *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Auditor dengan Etika auditor sebagai variabel moderasi*, Simposium Nasional Akuntansi X.
- Arens, Alvin A., and J.K. Loebecke, 1996, *Auditing : Pendekatan Terpadu*, Adaptasi oleh Amir Abadi Yusuf, Buku Satu Salemba Empat, Jakarta.
- Alia, Ariesanti. 2001, *Presepsi Auditor Terhadap Kualitas Audit*, Universitas Gadjah Mada. Tesis. Tidak untuk dipublikasikan.
- Arens, Hebert 2005 *Auditing II* : Modul oleh Pusdiklatwas BPKP Edisi ke Empat Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. Peraturan BPK-RI No. 1 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*.
- Bedrad, J. dan Michelene, Chi. T.H 1998, *Expertise in Auditing of Accounting Practice & Theory*.
- Boyton C. William, Kell. G Walter dan Johnson N Raymond, 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Jilid I Jakarta, Penerbit Erlangga.
- De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Independence, "Low Balling" and Disclosure Regulation*. Journal of Accounting and Economics . pp. 113 – 127.
- Deis, D.R dan G.A. Groux. 1992. *Determinants of Audit Quality in The Public Sector*. *The Accounting Review*. Juli. p. 426 – 479.
- Elim, John. 2006. *Implementasi Risk Based in Audit*. Diklat Teknis Substansi Bawasda, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Haliah, 2011. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Komitmen, Kepatuhan Pada Kode Etik, Terhadap Kualitas Audit Di Pulau Sulawesi*. Proposal Disertasi. Program Pascasarjana UNHAS Makassar.
- Harahap Sofyan Safri,. 1991. *Auditing Kontemporer*, Erlangga, Surabaya.

- Hogan, Chris E. 1997. *Cost and Benefits of Audit Quality in IPO Market : A Self Selection Analysis*, The Accounting Review, pp 67 - 86
- Indriantoro dan Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama BPFE Yogyakarta
- Indra Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Iksan, Arfan dan Ghozali, Imam, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*, PT. Madju Medan Cipta, Medan.
- Jurnal Wasdu, Vol. 1 No. 3 Februari 2007. *Auditor Bukan Whistle Blower*. Itjen Depdagri.
- Komalasari, Agrianti. 2003. *Analisis pengaruh Kualitas Auditor dan proxi going concern terhadap opini audit*, Universitas Gadjah Mada. Tesis. Tidak untuk dipublikasikan.
- Lubis, Ade Fatma, et.al. 2007. *Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution)* untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis.
- Mustarin Singke, 2008. *Cara Singkat Mendalami Metodologi Penelitian Praktek, Sikripsi, Tesis & Disertasi*, CV Berkah Utami;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. “*Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.*”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang *Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.*
- Sarundajang, 2004. *Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bidang Pengawasan*, Jakarta.
- STAN, 2007. *Dasar – Dasar Audit Internal Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,. ([www.Stan-star.ac.id](http://www.Stan-star.ac.id)).
- Huntoyungo, Siti Badriyah. 2009. *Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit. (Studi Pada Inspektorat Daerah Gorontalo)*. Tesis.

- Lastanti Sri, Hexana. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005. Hal 85-97
- Sutrisno Hadi, 1985. *Metodologi Penelitian Research* Jilid 2 & 4, UGM Yogyakarta
- Kitta, Syfarudin. 2009. *Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)*. Tesis.
- UU. No 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Widagdo, 2002. *Pengaruh Atribut – Atribut Kualitas Auditor Terhadap Kepuasan Klien Pada Kantor Akuntan Publik*.

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Kepada yth  
Bapak/Ibu/Saudara (i) Auditor  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin Makassar sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi untuk program bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara dengan judul :

### **PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI DAN ETIKA TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA**

Berkaitan dengan penelitian tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk mengisi kuesioner ini dengan harapan menjawab dengan leluasa, sesuai dengan yang dirasakan, dilakukan dan dialami; bukan berdasarkan apa yang seharusnya atau yang ideal.

Sesuai dengan kode etik penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan data yang responden berikan. Hal ini semata – mata untuk kepentingan penelitian ilmiah, dimana hanya ringkasan dan hasil analisis yang akan dipublikasikan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ternate, Juni 2011

Hormat Peneliti

**H. Ruslan Ashari**



### KUESIONER PENELITIAN

- Nama : \_\_\_\_\_
- Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita
- Umur : 1. 20 s/d 30 tahun  
2. 31 s/d 40 tahun  
3. 41 s/d 50 tahun  
4. 51 s/d 60 tahun
- Pendidikan : 1. SMA / sederajat 2. Diploma / sarjana muda 3. Sarjana /  
Magister
- Masa Kerja : 1. Dibawah 5 tahun  
2. 5 s/d 10 tahun  
3. 11 s/d 15 tahun  
4. 16 s/d 20 tahun  
5. Lebih dari 20 tahun

Setiap pertanyaan berikut hanya membutuhkan satu jawaban. Pertanyaan dijawab dengan kriteria sebagai berikut :

STS : Sangat Tidak Setuju, TS : Tidak Setuju, N : Netral, S : Setuju, SS : Sangat Setuju

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>KUALITAS AUDITOR (Y)</b>						
1	APIP melakukan Tupoksi dengan efektif					
2	APIP mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)					
3	APIP melaksanakan koordinasi audit					
4	APIP melaksanakan perencanaan audit					
5	APIP melakukan penilaian efektifitas tindak lanjut hasil dan konsistensi penyajian laporan hasil audit					
<b>KEAHLIAN (X1)</b>						
1	APIP memiliki tingkat pendidikan formal minimal Starta Satu (S1)					
2	APIP mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dibidang auditing, Akuntansi sektor publik dan keuangan daerah					
3	APIP memiliki keahlian di bidang auditing					
4	APIP memiliki keahlian di bidang akuntansi sektor publik, keuangan dan lain – lain					

5	APIP mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan					
6	APIP memiliki ketrampilan dan berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan auditan/obrik					
	<b>INDEPENDENSI (X2)</b>					
1	APIP bebas dari intervensi dan mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi					
2	APIP harus memiliki sikap netral dan tidak bias					
3	APIP menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit					
4	APIP tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan/obrik seperti hubungan aosomal, kekeluargaan atau hubungan lainnya					
5	Auditor melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi jika Independensi atau objektivitas terganggu baik secara fakta maupun penampilan					
6	Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menghadapi gangguan terhadap konflik kepentingan					
	<b>ETIKA (X3)</b>					
1	APIP melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab					
2	APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi intern					
3	APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap auditan/obrik					
4	APIP bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap masyarakat					

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner.

## Lampiran 2 Frekuensi Jawaban Responden

### Frequencies Kualitas Auditor

Statistics

		Kualitas Auditor 1	Kualitas Auditor 2	Kualitas Auditor 3	Kualitas Auditor 4	Kualitas Auditor 5
N	Valid	52	52	52	52	52
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.00	4.04	3.90	4.02	3.90
Mode		4	4	4	4	4
Std. Deviation		.626	.791	.569	.700	.569
Variance		.392	.626	.324	.490	.324
Minimum		3	2	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5

### Frequency Table

Kualitas Auditor 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	10	19.2	19.2	19.2
	Setuju	32	61.5	61.5	80.8
	Sangat Setuju	10	19.2	19.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Kualitas Auditor 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	7.7	7.7	7.7
	Netral	3	5.8	5.8	13.5
	Setuju	32	61.5	61.5	75.0
	Sangat Setuju	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Kualitas Auditor 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	11	21.2	21.2	21.2
	Setuju	35	67.3	67.3	88.5
	Sangat Setuju	6	11.5	11.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Kualitas Auditor 4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	12	23.1	23.1	23.1
	Setuju	27	51.9	51.9	75.0
	Sangat Setuju	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Kualitas Auditor 5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	11	21.2	21.2	21.2
	Setuju	35	67.3	67.3	88.5
	Sangat Setuju	6	11.5	11.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Frequencies Keahlian****Statistics**

		Keahlian 1	Keahlian 2	Keahlian 3	Keahlian 4	Keahlian 5	Keahlian 6
N	Valid	52	52	52	52	52	52
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.02	3.90	4.02	4.13	3.50	4.13
Mode		4	4	4	4	4	4
Std. Deviation		.700	.569	.700	.864	.960	.864
Variance		.490	.324	.490	.746	.922	.746
Minimum		3	3	3	1	2	1
Maximum		5	5	5	5	5	5

**Frequency Table****Keahlian 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	12	23.1	23.1	23.1
	Setuju	27	51.9	51.9	75.0
	Sangat Setuju	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Keahlian 2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	11	21.2	21.2	21.2
	Setuju	35	67.3	67.3	88.5
	Sangat Setuju	6	11.5	11.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Keahlian 3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	12	23.1	23.1	23.1
	Setuju	27	51.9	51.9	75.0
	Sangat Setuju	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Keahlian 4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.9	1.9	1.9
	Netral	10	19.2	19.2	21.2
	Setuju	21	40.4	40.4	61.5
	Sangat Setuju	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Keahlian 5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	9	17.3	17.3	17.3
	Netral	16	30.8	30.8	48.1
	Setuju	19	36.5	36.5	84.6
	Sangat Setuju	8	15.4	15.4	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Keahlian 6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.9	1.9	1.9
	Netral	10	19.2	19.2	21.2
	Setuju	21	40.4	40.4	61.5
	Sangat Setuju	20	38.5	38.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

## Frequencies Independensi

**Statistics**

	Independensi 1	Independensi 2	Independensi 3	Independensi 4	Independensi 5	Independensi 6
N Valid	52	52	52	52	52	52
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4.31	3.90	4.25	4.29	4.00	4.29
Mode	5	4	5	5	4	5
Std. Deviation	.755	.569	.738	.723	.714	.723
Variance	.570	.324	.544	.523	.510	.523
Minimum	3	3	3	3	2	3
Maximum	5	5	5	5	5	5

## Frequency Table

**Independensi 1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	9	17.3	17.3	17.3
Setuju	18	34.6	34.6	51.9
Sangat Setuju	25	48.1	48.1	100.0
Total	52	100.0	100.0	

**Independensi 2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	11	21.2	21.2	21.2
Setuju	35	67.3	67.3	88.5
Sangat Setuju	6	11.5	11.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

**Independensi 3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	9	17.3	17.3	17.3
Setuju	21	40.4	40.4	57.7
Sangat Setuju	22	42.3	42.3	100.0
Total	52	100.0	100.0	

**Independensi 4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	8	15.4	15.4	15.4
	Setuju	21	40.4	40.4	55.8
	Sangat Setuju	23	44.2	44.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Independensi 5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.9	1.9	1.9
	Netral	10	19.2	19.2	21.2
	Setuju	29	55.8	55.8	76.9
	Sangat Setuju	12	23.1	23.1	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Independensi 6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	8	15.4	15.4	15.4
	Setuju	21	40.4	40.4	55.8
	Sangat Setuju	23	44.2	44.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Frequencies Etika****Statistics**

		Etika 1	Etika 2	Etika 3	Etika 4
N	Valid	52	52	52	52
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.75	3.87	3.81	3.75
Mode		3	3	4	4
Std. Deviation		.738	.793	.742	.653
Variance		.544	.629	.551	.426
Minimum		3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5

## Frequency Table

**Etika 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	22	42.3	42.3	42.3
	Setuju	21	40.4	40.4	82.7
	Sangat Setuju	9	17.3	17.3	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Etika 2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	20	38.5	38.5	38.5
	Setuju	19	36.5	36.5	75.0
	Sangat Setuju	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Etika 3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	20	38.5	38.5	38.5
	Setuju	22	42.3	42.3	80.8
	Sangat Setuju	10	19.2	19.2	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

**Etika 4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	19	36.5	36.5	36.5
	Setuju	27	51.9	51.9	88.5
	Sangat Setuju	6	11.5	11.5	100.0
	Total	52	100.0	100.0	



### Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.

#### Scale: ALL VARIABLES

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded( a)	0	.0
	Total	52	100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.888	5

##### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas Auditor 1	4.00	.626	52
Kualitas Auditor 2	4.04	.791	52
Kualitas Auditor 3	3.90	.569	52
Kualitas Auditor 4	4.02	.700	52
Kualitas Auditor 5	3.90	.569	52

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kualitas Auditor 1	15.87	5.570	.504	.911
Kualitas Auditor 2	15.83	4.734	.608	.902
Kualitas Auditor 3	15.96	4.900	.884	.835
Kualitas Auditor 4	15.85	4.407	.869	.829
Kualitas Auditor 5	15.96	4.900	.884	.835

##### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19.87	7.452	2.730	5

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	6

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Keahlian 1	4.02	.700	52
Keahlian 2	3.90	.569	52
Keahlian 3	4.02	.700	52
Keahlian 4	4.13	.864	52
Keahlian 5	3.50	.960	52
Keahlian 6	4.13	.864	52

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Keahlian 1	19.69	8.845	.841	.794
Keahlian 2	19.81	10.080	.673	.829
Keahlian 3	19.69	8.845	.841	.794
Keahlian 4	19.58	9.151	.562	.844
Keahlian 5	20.21	8.994	.507	.861
Keahlian 6	19.58	9.151	.562	.844

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
23.71	12.837	3.583	6

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	6

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Independensi 1	4.31	.755	52
Independensi 2	3.90	.569	52
Independensi 3	4.25	.738	52
Independensi 4	4.29	.723	52
Independensi 5	4.00	.714	52
Independensi 6	4.29	.723	52

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Independensi 1	20.73	6.710	.524	.798
Independensi 2	21.13	7.452	.501	.802
Independensi 3	20.79	7.621	.286	.848
Independensi 4	20.75	6.074	.767	.741
Independensi 5	21.04	6.391	.674	.764
Independensi 6	20.75	6.074	.767	.741

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.04	9.332	3.055	6

## Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	4

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Etika 1	3.75	.738	52
Etika 2	3.87	.793	52
Etika 3	3.81	.742	52
Etika 4	3.75	.653	52

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Etika 1	11.42	3.072	.478	.716
Etika 2	11.31	2.688	.591	.651
Etika 3	11.37	3.099	.460	.726
Etika 4	11.42	2.994	.633	.637

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.17	4.852	2.203	4

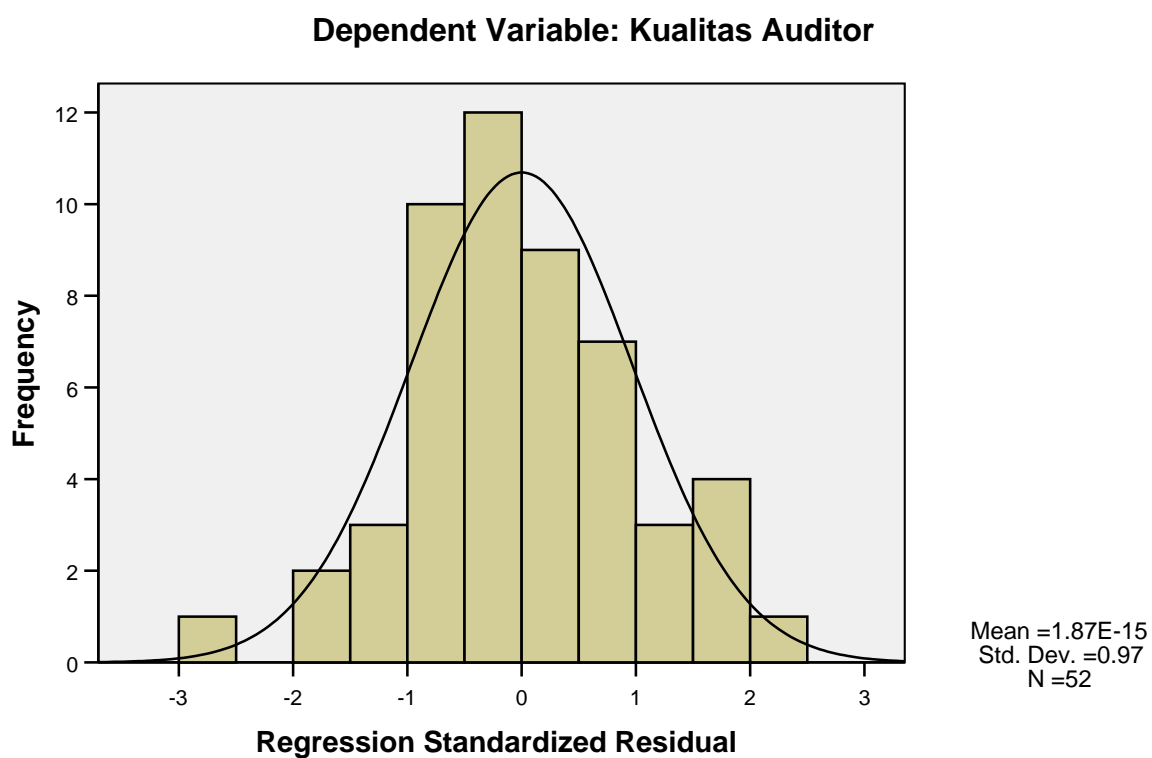
## Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik

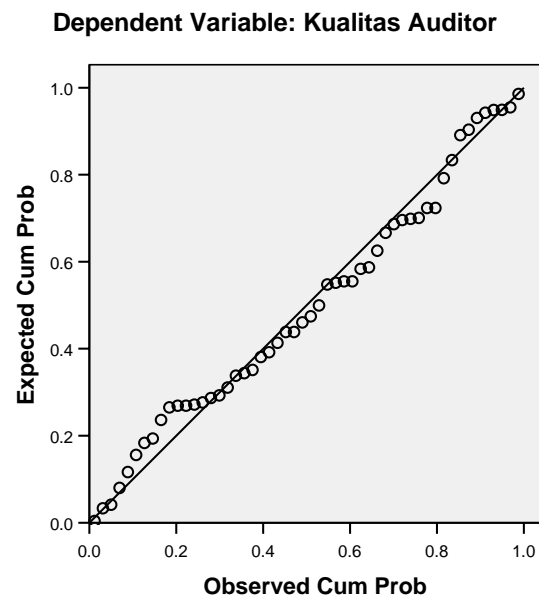
### 1. Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Keahlian	.543	1.841
Independensi	.567	1.764
Etika	.919	1.088

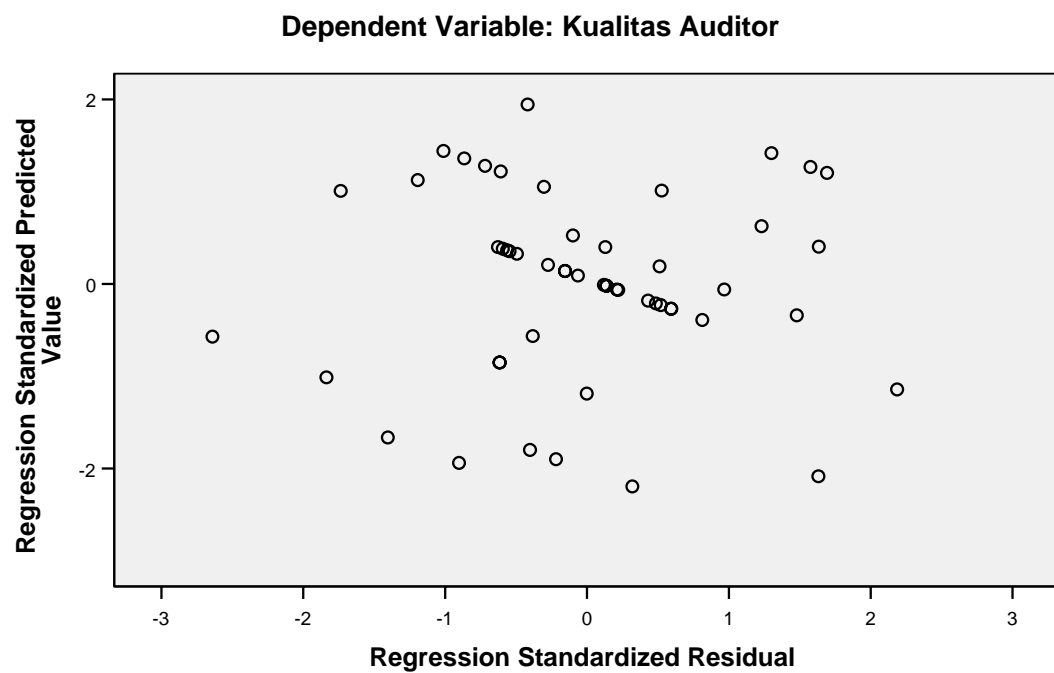
### 2. Uji Normalitas

#### Histogram



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

### 3. Uji Heterokedastisitas

**Scatterplot**

## Lampiran 5. Analisis Regresi Linear Berganda

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas Auditor	3.97	.546	52
Keahlian	3.95	.598	52
Independensi	4.17	.509	52
Etika	3.79	.551	52

### Correlations

		Kualitas Auditor	Keahlian	Independensi	Etika
Pearson Correlation	Kualitas Auditor	1.000	.854	.708	.206
	Keahlian	.854	1.000	.640	.205
	Independensi	.708	.640	1.000	-.019
	Etika	.206	.205	-.019	1.000
Sig. (1-tailed)	Kualitas Auditor	.	.000	.000	.071
	Keahlian	.000	.	.000	.072
	Independensi	.000	.000	.	.446
	Etika	.071	.072	.446	.
N	Kualitas Auditor	52	52	52	52
	Keahlian	52	52	52	52
	Independensi	52	52	52	52
	Etika	52	52	52	52

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Etika, Independensi, Keahlian(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Kualitas Auditor

**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.883(a)	.779	.766	.264	.779	56.562	3	48	.000	1.754

a Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian

b Dependent Variable: Kualitas Auditor

**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.850	3	3.950	56.562	.000(a)
	Residual	3.352	48	.070		
	Total	15.202	51			

a Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian

b Dependent Variable: Kualitas Auditor

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.021	.402		.052	.959	-.787	.829		
	Keahlian	.595	.084	.651	7.083	.000	.426	.764	.543	1.841
	Independensi	.314	.097	.292	3.246	.002	.119	.508	.567	1.764
	Etika	.077	.070	.078	1.104	.275	-.064	.218	.919	1.088

a Dependent Variable: Kualitas Auditor

**Coefficient Correlations(a)**

Model			Etika	Independensi	Keahlian
1	Correlations	Etika	1.000	.200	-.283
		Independensi	.200	1.000	-.658
		Keahlian	-.283	-.658	1.000
	Covariances	Etika	.005	.001	-.002
		Independensi	.001	.009	-.005
		Keahlian	-.002	-.005	.007

a Dependent Variable: Kualitas Auditor

**Collinearity Diagnostics(a)**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Keahlian	Independensi	Etika
1	1	3.965	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.021	13.775	.00	.11	.08	.54
	3	.010	20.393	.34	.55	.08	.15
	4	.004	30.037	.65	.35	.84	.31

a Dependent Variable: Kualitas Auditor



**Residuals Statistics(a)**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.92	4.91	3.97	.482	52
Std. Predicted Value	-2.194	1.945	.000	1.000	52
Standard Error of Predicted Value	.039	.132	.070	.020	52
Adjusted Predicted Value	2.90	4.92	3.98	.485	52
Residual	-.698	.578	.000	.256	52
Std. Residual	-2.641	2.186	.000	.970	52
Stud. Residual	-2.854	2.334	-.007	1.016	52
Deleted Residual	-.815	.658	-.004	.282	52
Stud. Deleted Residual	-3.099	2.453	-.008	1.045	52
Mahal. Distance	.126	11.805	2.942	2.223	52
Cook's Distance	.000	.342	.025	.056	52
Centered Leverage Value	.002	.231	.058	.044	52